

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Munculnya globalisasi menyebabkan terjadinya pergeseran pada tatanan Hubungan Internasional. Dimana isu yang bersifat *high-politics* tidak lagi menjadi isu yang dikedepankan. Tidak hanya itu, perubahan tatanan tersebut juga memicu munculnya aktor baru selain negara, yakni *Inter-Governmental Organizations* (INGOs), *Non-Governmental Organizations* (NGO), *Multinational Corporations* (MNC), media, individu bahkan pemerintah daerah. Layaknya aktor internasional pada umumnya, pemerintah daerah juga melakukan proses praktis diplomasi sebagai alat untuk berkomunikasi (Fathun, 2016). Diplomasi yang di jalankan tersebut pada hakikatnya digunakan untuk melakukan kerja sama dengan negara lain. Hal tersebut dikarenakan adanya urgensi pemerintah daerah untuk memenuhi kepentingan daerahnya. Kepentingan daerah itu biasanya merupakan kepentingan yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat, yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan kerja sama dengan aktor internasional di luar dari kuasa pemerintah pusat. Kerja sama atau aktivitas yang terjalin antara pemerintah daerah dengan negara lain dalam hubungan internasional disebut dengan paradiplomasi (Kusnetzov, 2015).

Akibat semakin berkembangnya aktivitas kerja sama antara pemerintah daerah, munculah satu model kerja sama internasional baru yang dilakukan oleh pemerintah kota di berbagai belahan dunia yang dikenal dengan *sister city* (Firdayana, 2019). Kerangka *sister city* atau sering juga disebut dengan *Twin City* adalah kerangka kerja sama yang hanya bisa dilaksanakan antara pemerintah kabupaten atau kota atau kota administratif dengan tingkatan yang sama di luar negeri, contohnya seperti kota dengan kota, provinsi dengan provinsi (Bagian Kerjasama Kota Bandung, 2019). Model kerja sama ini pertama kali digunakan pada tahun 1920 antara Kota Yorkshire Barat, Inggris dengan Kota Poix Du Nord, Perancis dengan istilah yang terkenal di Eropa sebagai *Twin City* (Firdayana, 2019). Sedangkan istilah kerja sama *sister city* pertama kali dikenalkan tahun 1956 oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Dweight D. Eisenhower yang awalnya ditujukan

untuk meningkatkan diplomasi antar masyarakat dan akhirnya berkembang ke tingkat kota dan provinsi (Ariana, 2016).

Setidaknya terdapat 47 pemerintah kota di Indonesia di 34 provinsi telah melakukan kerja sama *sister city* dan Kota Bandung merupakan salah satu kota yang aktif dalam melakukan kerja sama dalam kerangka *sister city* (Adinda FA, Bainus, & Riswanda, 2020). Selain itu, Bandung juga dianggap sebagai kota pelopor di Indonesia karena keaktifannya sejak 1960 dan merupakan kota awal yang melakukan kerjasama dengan kerangka *sister city* (Dermawan, Akim, & Primawati, 2020). Terhitung pada tahun 2020, Bandung telah melakukan kurang lebih 29 kerja sama dalam framework *sister city*, tetapi dari 29 kerja sama tersebut hanya 14 kerja sama yang masih aktif, dimana kerja sama dengan Kota Seoul merupakan salah satu yang masih aktif (Adinda FA, Bainus, & Riswanda, 2020).

Kerja sama antara kedua kota itu didasari oleh adanya hubungan baik antara kedua negara dari kota tersebut yaitu Indonesia dan Korea Selatan. Kedua negara ini memiliki riwayat hubungan yang baik dimana sudah dimulai pada tahun 1973 dengan pembukaan hubungan diplomatik dan pembukaan kedutaan besar di masing-masing negara (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2018). Setelah 40 tahun kedua negara ini melakukan hubungan baik, pada tahun 2006 Indonesia dan Korea Selatan membentuk *Joint Commission* yang disepakati oleh masing-masing Menteri Luar Negeri untuk memfokuskan kerja sama bilateral kedua negara tersebut dan meningkatkan kesadaran bersama dalam kerja sama ekonomi dan teknologi yang diresmikan dengan adanya penandatanganan *The Joint Declaration on Strategic Patnership to Promote Friendship and Cooperation* oleh kedua perwakilan dari Indonesia dan Korea Selatan (Apriliani, 2017). Dari pembentukan *Joint Comission*, hubungan kedua negara ini semakin menguat dan menjadi jembatan dari pembuatan kerja sama-kerja sama lain antara kedua negara ini yang salah satunya yaitu kerja sama *sister city* Bandung dengan Seoul (Apriliani, 2017).

Bandung juga telah lebih dahulu melakukan kerja sama *sister city* aktif dengan kota di Korea Selatan yaitu Kota Suwon. (Fitri, 2016) Kerja sama *sister city* dengan Kota Suwon ini sudah mulai dari tahun 1997 yang memberikan dampak positif bagi kedua kota dan masih berjalan hingga sekarang (Fitri, 2016). Hal ini

menjadi pertimbangan yang baik bagi kedua kota dalam melakukan kerja sama *sister city* ini.

Kerja sama antara Kota Bandung dan Seoul dimulai dengan penandatanganan *Letter of Intent* pada tahun 2015 sebagai bukti awal antara kedua kota atas wujud keseriusan kedua kota dalam membangun kerja sama antar kota sebelum memasuki tahap MoU (Rahma, 2019). Kedua kota sepakat mengadakan kerja sama dengan kerangka *sister city* oleh adanya kesamaan tingkat status administrasi kota dan karakteristik kedua kota yang merupakan kota padat penduduk (Apriliani, 2017).

Kerja sama ini dilanjutkan dengan direncanakannya *Master Plan* kerja sama yang berfokus pada pembangunan *Smart City* di Kota Bandung (Kerjasama Kota Bandung, 2017). *Master Plan* ini merupakan tindak lanjut dari isi *Letter of Intent* yang menyebutkan fokus bidang kerjasama yang salah satunya di bidang e-government dan poin-poin kerjasama lainnya (Kerjasama Kota Bandung, 2017).

Giatnya pembangunan *Smart City* di Bandung ini juga tidak lain merupakan upaya walikota Bandung, yang pada saat itu dijabat oleh Ridwan Kamil untuk mewujudkan Kota Bandung menjadi kota berbasis *smart city* yang memiliki sistem informasi dan platform digital yang terintegrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya (Rahayu, 2017). Adanya potensi Kota Bandung dalam manajemen dan tata kelola kotanya dan munculnya trend pembangunan *smart city* di dunia menjadi acuan untuk memanfaatkan inovasi dan teknologi dalam pembangunan kota pintar dalam kerja sama ini (Septiarika & Bramastya, 2020).

Keputusan kerja sama ini difokuskan dalam bidang *e-government* didorong oleh kemajuan Korea Selatan yang merupakan negara dari Seoul dalam pembangunan pemerintahan berbasis elektronik yang menempatkan posisi pertama pembangunan *E-government* terbaik menurut *UN E-Government Survey* pada tahun 2012 dan 2014 tercermin pada Indeks pembangunan *e-government* yaitu Korea Selatan (UN E-Government Knowledgebase, 2020). Dari data ini menunjukkan bahwa Korea Selatan berhasil menerapkan pembangunan pemerintahan berbasis elektronik yang memiliki sistem informasi terintegrasi melalui satu platform digital (UN E-Government Knowledgebase, 2020). Sementara Indonesia, menempatkan peringkat ke 106 pada tahun 2014 menurut *UN E-Government Survey* (UN E-

Government Knowledgebase, 2020). Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan *e-government* di kota-kota Indonesia termasuk Bandung, masih belum mendapatkan perhatian lebih pada masa itu. Walaupun dalam upaya pembangunannya, Bandung sudah memulai pembangunan *e-government* sejak 2001 yaitu dengan adanya peluncuran website www.bandung.go.id, penerapan pemerintahan berbasis elektronik masih sangat jauh dari tingkat memadai (Adibowo & Putri, 2016). Pemerintah Kota Bandung pun menyadari bahwa *E-Government* di Kota Bandung masih membutuhkan bantuan pembangunan (Adibowo & Putri, 2016).

Dengan adanya perbandingan dalam indeks dan penerapan pembangunan *e-government* diatas, menggambarkan bahwa Seoul merupakan bidikan yang strategis bagi Bandung untuk melakukan kerja sama dalam pembangunan *e-government*. Kerja sama ini diharapkan akan mendorong Kota Bandung melakukan pembelajaran dan lebih proaktif mewujudkan pemerintahan yang berbasis elektronik yang didapatkan dari advokasi kebijakan dengan Kota Seoul dan melakukan pertukaran informasi dan praktis antara kedua kota (Septiarika & Bramastya, 2020). Harapan ini juga terbentuk dari motivasi besar Kota Bandung agar bisa menyaingi keunggulan Kota Seoul dan menjadi lebih baik dibanding Kota Bandung sebelumnya (Septiarika & Bramastya, 2020).

Tertuang pada *Letter of Intent*, poin-poin dari kerja sama *e-government* ini adalah kerja sama sistem manajemen dan integrasi informasi, digital platform (Bagian Kerjasama Kota Bandung , 2015). Dalam pengimplementasian kerja sama ini, diatur secara lebih detail dalam *Memorandum of Understanding* yaitu kedua kota secara aktif melakukan kerja sama persahabatan melalui pertukaran dan kerja sama berbagai keahlian dan praktik-praktik terbaik seperti pertukaran personel dan pelatihan yang difasilitasi oleh kedua pemerintah kota (Firdayana, 2016).

Sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama pada tahun 2015 lalu dapat dilihat kerja sama ini merupakan jembatan bagi kedua belah pihak untuk secara aktif melakukan komunikasi dan kerja sama untuk mempercepat terwujudnya tujuan dan harapan bagi masing-masing pihak. Tetapi pada kenyataannya, kedua kota ini memperlihatkan keseriusan dalam pengimplementasian kerja sama ini

hanya pada satu tahun pertama saja yaitu pada tahun 2016 (Adinda FA, Bainus, & Riswanda, 2020).

Setelah dilakukannya kerja sama antara kedua kota pada tahun 2016 sebagai wujud implementasi pertukaran informasi dan praktik terbaik, kerja sama *sister city* di bidang *e-government* ini tidak lagi ada upaya kelanjutan kerja sama pembangunan *e-government*. Kerja sama ini hanya berjalan setahun pertama saja, padahal apabila kedua kota mengimplementasikan komitmennya untuk secara aktif mengoptimalkan kerja sama ini dalam membangun *e-government* di Bandung, kerja sama ini dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan *e-government* di Kota Bandung sendiri dan mempercepat terwujudnya penerapan Smart City di Kota Bandung.

Faktanya, Bandung masih belum dapat sepenuhnya menerapkan *smart city* dan masih memerlukan banyak pembangunan di bidang tersebut (Septiarika & Bramastya, 2020). Harapan bahwa adanya kerja sama ini dapat menjadi jembatan terjadinya pertukaran informasi dan keahlian yang ditujukan untuk pembangunan *smart city* khususnya *e-government* di Bandung tidak berjalan dengan optimal apabila dibandingkan dengan kerja sama di bidang tata kota.

Dalam penerapannya, Pemerintah Kota Seoul dan Bandung lebih befokus dalam melakukan pembangunan di bidang tata kota. Keaktifan ini membawa hasil yang dapat dirasakan langsung manfaatnya, salah satunya adalah revitalisasi sungai cikapundung dan pembangunan beberapa *flyover* dengan bantuan dana dan pembangunan dari pihak swasta kota Seoul yaitu Yooshin Engineering Corporation dan Korean Institute of Construction Technology (Firdayana, 2019). Kedua belah pihak secara aktif menjembatani potensi kerja sama di bidang tata kota antara Pemerintah Kota Bandung dan pihak swasta Kota Seoul. Berbeda dengan *e-Government*, implementasi kerja sama hanya dilakukan di tahun-tahun awal saja. Kegiatan kerja sama yang dilakukan tidak berbanding lurus dengan tujuan yang diharapkan pada kerja sama ini.

I.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, penelitian ini akan membahas tentang **Kerja sama Sister City Kota Bandung – Kota Seoul dalam bidang E-**

Ivonne Chandra Dewi, 2022

KERJASAMA SISTER CITY BANDUNG – SEOUL PERIODE TAHUN 2016-2020 DI BIDANG E-GOVERNMENT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Government periode 2016 – 2020. Kerja sama ini merupakan suatu bentuk upaya pemerintah Bandung untuk mengimplementasikan konsep *smart city* di kotanya. Kota Seoul dan Bandung setuju untuk melakukan kerja sama ini dengan kesepakatan bersama melalui penandatanganan *Letter of Intent* pada tahun 2015 dengan salah satu bidang fokusnya adalah *e-government*. Kerja sama ini diharapkan secara aktif menjembatani pertukaran informasi dan kolaborasi kebijakan dan keahlian antara kedua belah pihak dan memberikan keuntungan secara optimal, dimana dalam kasus ini adalah pembangunan *e-government* di Bandung demi menerapkan *smart city*.

Dalam penerapannya, kerja sama ini hanya giat dilakukan pada tahun pertama setelah kerja sama ini ditanda tangani. Komitmen kedua kota dalam mengimplementasikan kerja sama ini hanya terlihat pada awal kerja sama saja. Padahal apabila kerja sama ini dijalankan secara aktif dan optimal seperti yang tertuang pada *Memorandum of Understanding*, kerja sama ini dapat memberikan kontribusi yang besar dan juga dapat mempercepat terwujudnya pembangunan *e-government* di Kota Bandung seperti harapan awal walikota Bandung. Dari das sein dan das sollen diatas, dapat ditarik pertanyaan masalah yaitu **“Mengapa kerja sama Sister City antara Kota Bandung dan Seoul dalam bidang *e-government* tidak berjalan secara optimal?”**

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu menganalisis dan memahami alasan kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Seoul dalam bidang *e-government* tidak berjalan optimal.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1. Manfaat akademis** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi para penstudi HI dalam kajian paradiplomasi tentang peran pemerintah Kota Bandung dan Seoul dalam kerangka kerja sama *sister city* bagi kajian ilmu Hubungan Internasional.

Ivonne Chandra Dewi, 2022

KERJASAMA SISTER CITY BANDUNG – SEOUL PERIODE TAHUN 2016-2020 DI BIDANG E-GOVERNMENT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

2. **Manfaat praktis** Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan saran dan evaluasi mengenai kerjasama Sister City ini di bidang *E-government* khususnya bagi pemerintah Kota Bandung.

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pertama, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua berisi mengenai studi dari penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, alur pemikiran, dan asumsi dari penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah yaitu jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV: IMPLEMENTASI KERJA SAMA SISTER CITY BANDUNG – SEOUL DI BIDANG E-GOVERNMENT

Bab ini berisikan pembahasan dari kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Seoul di bidang *e-government* termasuk program-program yang telah dilaksanakan.

BAB V: ALASAN KERJA SAMA ANTARA BANDUNG - SEOUL DI BIDANG E-GOVERNMENT TIDAK BERJALAN OPTIMAL

Bab ini berisi mengenai penjelasan mengapa kerja sama antara Kota Bandung dan Seoul tidak berjalan secara optimal dengan menjelaskan faktor-faktor pendorong tidak berjalan optimalnya kerja sama *e-government* ini.

BAB VI: PENUTUP

Ivonne Chandra Dewi, 2022

KERJASAMA SISTER CITY BANDUNG – SEOUL PERIODE TAHUN 2016-2020 DI BIDANG E-GOVERNMENT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Bab ini merupakan bab penutup dari hasil penelitian ini yang berisikan mengenai kesimpulan dari permasalahan penelitian ini yang merupakan analisis data yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA